









LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM DAN KEADILAN

About the Journal

The Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan (ISSN Print 2581-2033, ISSN Online 2580-9113) is a double-blind peer-reviewed law journal and scholarly journal with a national and international outlook, published by the Faculty of Law, University of Dr. Soetomo. Lex Journal is a scholarly publication exploring critical issues and developments in law and justice. The journal serves as a platform for academics, legal professionals, and researchers to share rigorous analyses, contemporary perspectives, and innovative research on various topics within the legal realm. These include but are not limited to constitutional law, criminal justice, human rights, international law, legal theory, and jurisprudence. The journal aims to foster scholarly dialogue on the role of law in promoting justice, protecting individual rights, and shaping public policy. Through articles, case studies, essays, and book reviews, Lex Journal seeks to contribute to the global discourse on legal reform, social justice, and the rule of law, making it a vital resource for those committed to advancing legal scholarship and practical application in the pursuit of a just society. Whether addressing contemporary legal challenges or historical legal frameworks, Lex Journal stands as a bridge between academic theory and practical law, encouraging readers to reflect on the evolving justice landscape. It is published thrice a year in March, July, and December. A related purpose is to provide a systematic review of important initiatives for developing law and legal practice. The Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan publishes cutting-edge legal scholarship by both academics and legal practitioners. Established in 2017, the Journal finds its roots in a desire to propose constructive, well-reasoned reforms in all areas of the law.

Journal Identity	Description
ID Submission: 11541	Published: 2026-01-26
Indexing	
	
	
	

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Penegakan Hukum Pidana Pemalsuan Merek Rokok (Studi Putusan MA No. 3067
K/Pid.Sus/2019)

Moch Damar Jaya

Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo

Email: damarjayaa@yahoo.co.id

Sri Astutik

Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo

Email: sri.astutik@unitomo.ac.id

Vallencia Nandya Paramitha

Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo

Email: vallencia@unitomo.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penegakan hukum pidana terhadap pemalsuan merek dengan studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3067 K/Pid.Sus/2019. Fokus kajian diarahkan pada penerapan hukum pidana terhadap pemalsuan merek rokok serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Tujuannya adalah menilai kesesuaian putusan dengan hukum pidana positif sekaligus menganalisis kesenjangan antara norma (*das sollen*) dan praktik (*das sein*). Dengan pendekatan normatif dan teori Lawrence M. Friedman (substansi, struktur, budaya hukum), penelitian menemukan bahwa meski Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengatur ancaman pidana berat, hakim tetap menjatuhkan sanksi ringan meskipun terdakwa residivis. Hal ini mencerminkan lemahnya daya paksa norma, struktur hukum yang belum solid, dan budaya hukum yang permisif. Perbandingan dengan sistem Amerika Serikat (*treble damages*) dan Tiongkok (pengawasan AMR) menunjukkan efektivitas lebih baik. Implikasinya, Indonesia perlu memperkuat pengawasan DJKI dan membuka ruang restitusi untuk efek jera.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pemalsuan Merek, Rokok

1. PENDAHULUAN

Pemalsuan merek merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak kekayaan intelektual (HKI) yang semakin berkembang seiring dengan globalisasi perdagangan. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi pemilik merek, tetapi

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

juga melemahkan integritas sistem hukum dan membahayakan konsumen. Laporan World Intellectual Property Organization (WIPO, 2025) menegaskan bahwa pemalsuan merek berdampak signifikan pada keberlangsungan usaha kecil dan menengah, di mana potensi kebangkrutan meningkat hingga 34% akibat kerugian ekonomi yang ditimbulkan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pemalsuan merek merupakan kejahatan lintas negara yang memerlukan penegakan hukum yang tegas dan konsisten.

Dalam konteks nasional, Indonesia menghadapi tantangan serius pada sektor industri rokok. Produk rokok ilegal yang beredar dengan merek palsu tidak hanya merugikan produsen sah, tetapi juga mengurangi penerimaan negara dari sektor cukai dan berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat (Ratna, 2020). Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), pelanggaran merek merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering ditangani dalam beberapa tahun terakhir. Indonesia sebenarnya telah memiliki perangkat hukum yang cukup progresif melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi persoalan, terutama terkait dengan konsistensi aparat penegak hukum, proporsionalitas sanksi pidana, serta efektivitas pemidanaan dalam memberikan efek jera (Aldison et al., 2021).

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3067 K/Pid.Sus/2019 menjadi salah satu contoh konkret persoalan tersebut. Dalam kasus ini, terdakwa terbukti secara sah memproduksi dan mengedarkan rokok bermerek palsu “Gudang Djati”, namun hanya dijatuhi pidana penjara dua tahun dan denda Rp200.000.000. Keputusan ini memunculkan pertanyaan apakah sanksi tersebut sudah mencerminkan perlindungan hukum yang memadai dan konsisten dengan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana (Khelvin Risandi & Hari Sutra Disemadi, 2022).

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan kelemahan struktural dan normatif dalam penanganan perkara pemalsuan merek. Ratna (2020) menekankan lemahnya koordinasi antar-lembaga penegak hukum sebagai faktor rendahnya efek jera. Widasari

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Widodo et al. (2022) menemukan bahwa inkonsistensi sanksi pidana memperlihatkan lemahnya integrasi antara substansi hukum dan pelaksanaannya. Sementara itu, penelitian perbandingan lintas negara menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum lebih terjamin di negara-negara yang menerapkan pendekatan komprehensif. Di Türkiye, hambatan utama adalah koordinasi kelembagaan dan kultur hukum (Bural, 2025), sedangkan di Tiongkok, pengawasan administratif yang ketat dikombinasikan dengan jalur pidana terbukti meningkatkan daya jera (Chow, 2022); (Kammel et al., 2023). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan praktik di Indonesia (*das sein*) yang masih perlu diperbaiki.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan merek rokok sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3067 K/Pid.Sus/2019? dan (2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara pemalsuan merek rokok dalam putusan tersebut? Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara yuridis normatif bentuk dan pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap pemalsuan merek rokok, serta mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan teori hukum pidana, teori perlindungan hukum, dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Teori Friedman menekankan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum (aturan yang berlaku), tetapi juga oleh struktur hukum (aparatur penegak hukum), serta budaya hukum (nilai, sikap, dan persepsi masyarakat terhadap hukum). Dengan menggunakan kerangka ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai konsistensi dan kecukupan sanksi pidana terhadap pemalsuan merek, sekaligus menilai sejauh mana sistem hukum Indonesia mampu memberikan perlindungan yang efektif.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

2. METODE PENELITIAN

Melalui metode dan kerangka analisis dalam latar belakang, penelitian ini diarahkan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan merek rokok, sekaligus menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Analisis berikut disusun untuk mengaitkan norma hukum yang berlaku dengan realitas praktik peradilan sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3067 K/Pid.Sus/2019. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada studi terhadap norma hukum tertulis. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah kaidah-kaidah hukum yang mengatur penegakan hukum pidana dalam kasus pemalsuan merek rokok. Fokus utama dari penelitian ini adalah bagaimana ketentuan hukum positif, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta KUHP, digunakan dan diinterpretasikan dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara menginventarisasi dan menelaah dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang memiliki relevansi langsung dengan topik penelitian. Selain itu, dilakukan penelusuran terhadap doktrin dan teori yang berkembang dalam literatur hukum pidana dan hukum perlindungan merek. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis, yakni menguraikan norma-norma hukum yang relevan dengan kasus yang dikaji, kemudian dianalisis secara sistematis menggunakan teori hukum pidana, teori perlindungan hukum, dan teori efektivitas hukum. Analisis dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian antara kaidah hukum dan implementasinya dalam praktik peradilan pidana, khususnya terkait pemalsuan merek.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

3. PEMBAHASAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3067 K/Pid.Sus/2019 berangkat dari perkara pemalsuan merek rokok “Gudang Djati” yang diproduksi dan diedarkan tanpa izin oleh terdakwa. Pada tingkat pertama, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama dua tahun dan denda Rp200.000.000 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan. Meskipun terdakwa merupakan residivis, sanksi yang dijatuhkan relatif ringan dibandingkan dengan ancaman pidana dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang memperbolehkan pidana hingga lima tahun penjara dan denda maksimal Rp2.000.000.000.

Dari perspektif substansi hukum, aturan yang berlaku sebenarnya sudah cukup memberikan dasar perlindungan yang kuat bagi pemilik merek. Namun, dalam praktiknya terdapat kecenderungan pengadilan menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari ancaman pidana maksimum. Dari aspek struktur hukum, peran penyidik, jaksa, dan hakim menunjukkan adanya keterbatasan koordinasi dalam menghadirkan bukti kerugian ekonomi maupun aspek teknis merek. Hal ini berimplikasi pada lemahnya argumentasi tuntutan dan pertimbangan majelis hakim. Dari sisi budaya hukum, baik aparat maupun masyarakat masih memandang pelanggaran HKI, khususnya pemalsuan merek rokok, bukan sebagai kejahatan serius sehingga hukuman yang dijatuhkan tidak menimbulkan efek jera yang signifikan.

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Pertimbangan hakim dalam putusan ini berfokus pada pemenuhan unsur pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016. Majelis hakim menilai bahwa unsur “dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhan barang” telah terpenuhi melalui alat bukti berupa barang bukti rokok palsu, keterangan saksi, dan pengakuan terdakwa. Namun, terdapat kecenderungan bahwa faktor yang meringankan terdakwa lebih dominan dalam putusan. Hakim menilai

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

bahwa terdakwa bersikap sopan, mengakui perbuatannya, serta dianggap sebagai tulang punggung keluarga. Sebaliknya, faktor yang memberatkan, yakni status residivis, tidak dijadikan pertimbangan utama dalam menentukan beratnya pidana. Hal ini menyebabkan sanksi yang dijatuhkan jauh dari maksimal, meskipun pemalsuan merek telah merugikan pemilik merek, konsumen, dan negara melalui potensi kehilangan cukai.

Dari perspektif teori hukum pidana, putusan ini lebih mencerminkan pendekatan retributif minimalis sekadar memberikan hukuman atas perbuatan namun tidak memenuhi aspek preventif karena hukuman yang ringan tidak menimbulkan efek jera (*general deterrence*). Ditinjau dari teori perlindungan hukum, ketiadaan perintah restitusi atau kompensasi bagi pemilik merek memperlihatkan lemahnya perlindungan represif. Sementara itu, dengan menggunakan kerangka teori sistem hukum Friedman, dapat disimpulkan bahwa lemahnya substansi (sanksi tidak maksimal), struktur (koordinasi aparat kurang optimal), dan budaya hukum (pidanaan permisif) berkontribusi terhadap inkonsistensi putusan.

Implikasi Hasil Penelitian

Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana terhadap pemalsuan merek rokok dalam Putusan MA No. 3067 K/Pid.Sus/2019 belum optimal. Sanksi yang dijatuhkan tidak sebanding dengan kerugian ekonomi dan dampak sosial yang ditimbulkan. Selain itu, pertimbangan hakim yang lebih menekankan pada faktor meringankan dibandingkan faktor memberatkan menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemilik merek belum maksimal. Secara teoretis, penelitian ini memperlihatkan kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan praktik peradilan (*das sein*). Secara praktis, hasil penelitian ini mengindikasikan perlunya pedoman pidana yang lebih ketat, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam perkara HKI, serta penguatan budaya hukum yang menempatkan pemalsuan merek sebagai kejahatan serius.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

4. PENUTUP

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pemidanaan dalam perkara pemalsuan merek rokok masih menghadapi masalah konsistensi dan proporsionalitas, sehingga belum sepenuhnya mendukung tujuan hukum pidana maupun perlindungan hukum terhadap pemilik merek. Temuan ini penting karena memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma yang telah memberikan ancaman pidana tegas dengan praktik peradilan yang justru melahirkan putusan ringan, sehingga mengurangi efek jera dan melemahkan kepercayaan terhadap sistem hukum. Ke depan, diperlukan pedoman pemidanaan yang lebih rinci bagi hakim dalam perkara HKI, penguatan koordinasi antar-aparat penegak hukum, serta peningkatan kesadaran publik tentang seriusnya kejahatan pemalsuan merek. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan putusan pengadilan tidak hanya berfungsi memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga mampu memperkuat kepastian hukum dan mendukung perlindungan HKI dalam menghadapi tantangan global.

4. REFERENSI

- Aldison, K. D., Sunarjo, S., & Djaja, H. (2021). Kajian yuridis tentang merek terkenal dan upaya hukum terhadap pelanggarannya. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 12(1), 41–50. <https://doi.org/10.26905/idjch.v12i1.5723>
- Bural, D. (2025). Protecting intellectual property rights in Türkiye: navigating legal and cultural dimensions. *Crime, Law and Social Change*, 83(1), 1–17. <https://doi.org/10.1007/s10611-024-10195-1>
- Chow, D. (2022). *BARRIERS TO CRIMINAL ENFORCEMENT AGAINST COUNTERFEITING IN CHINA*. *forthcoming*.
- Kammel, K., Kramer, M., Duquet, D., & Patterson, L. (2023). Trademark Counterfeiting Enforcement Beyond Borders: The Complexities of Enforcing Trademark Rights Extraterritorially in a Global Marketplace with Territorial-Based Enforcement. *SSRN Electronic Journal*, 33(3). <https://doi.org/10.2139/ssrn.4278756>
- Khelvin Risandi, & Hari Sutra Disemadi. (2022). Pemalsuan Merek Sepatu Di Indonesia: Pengaturan Dan Sanksi? *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(2),

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

315–326. <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i2.51029>

Ratna, W. (2020). *Laporan Penelitian Perlindungan Merek*. 1–47.

WIPO. (2025). *Advisory Committee on Enforcement: Twelfth Session*. 1–48.